

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI WABAH COVID-19 DARI PERSPEKTIF EKONOMI

Saleha Mufida¹, F.G. Cempaka Timur², Surryanto Djoko Waluyo³

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, IPSC, Bogor, 16810

² Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, IPSC, Bogor, 16810

³ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, IPSC, Bogor, 16810

*Email:saleha.mufida@idu.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak covid-19 bahkan menyumbang 7,8 persen angka kematian dan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Di tengah angka kasus yang terus meningkat, Indonesia justru menerima 49 tenaga kerja asing dari China. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak dapat mengabaikan aspek ekonomi dalam masa pandemi Covid-19. Penulis menganggap penting untuk mengkaji strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 dari perspektif ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19 dari perspektif ekonomi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif yaitu dari umum ke khusus. Data penelitian diperoleh dari studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Miles Hubermann, yaitu koleksi data, kondensasi, penyajian data, dan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dari aspek ekonomi yang dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19, diantaranya mengeluarkan paket ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti bantuan langsung tunai (BLT), menurunkan biaya listrik dan BBM, memberikan pemeriksaan gratis, ketimbang membesarkan nilai manfaat kartu prakerja dan kartu penerima sembako bagi program keluarga harapan, serta memberikan insentif bagi tenaga medis.

Kata kunci: Covid-19, ekonomi, Indonesia, strategi

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries affected by Covid-19 and even accounts for 7.8 percent of the death rate and is one of the highest in the world. In the midst of the increasing number of cases, Indonesia actually accepted 49 foreign workers from China. This policy shows that the Indonesian government cannot ignore the economic aspects of the Covid-19 pandemic. The author considers it important to study the Indonesian government's strategy in dealing with the Covid-19 outbreak from an economic perspective. This study uses a qualitative method with a case study approach. This study aims to provide input for the Government of Indonesia in taking Covid-19 handling policies from an economic perspective. Data analysis in qualitative research is carried out inductively, from general to specific. The research data were obtained from documentation studies. The data analysis technique used is the Miles Hubermann

analysis technique, namely data collection, condensation, data presentation, and conclusions. The conclusion of this study is that the government needs to issue policies from an economic aspect that can save people's lives during the Covid-19 pandemic, including issuing economic packages that can be directly felt by the community such as direct cash assistance (BLT), lowering electricity and fuel costs, providing free checks. , rather than increasing the value of the benefits of pre-employment cards and basic food recipient cards for the Harapan Family program, as well as providing incentives for medical personnel.

Keywords: *Covid-19, economy, Indonesia, strategy*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Draft Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015, wabah penyakit merupakan salah satu ancaman nyata bagi pertahanan negara. Dunia masih menghadapi epidemi beberapa penyakit infeksi yang berbahaya pada manusia. Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) terus memberikan peringatan kepada dunia bahwa penyakit infeksi berbahaya bagi umat manusia belum sepenuhnya dapat diatasi bahkan penyebarannya cenderung semakin luas. Hampir setiap tahun ditemukan satu hingga tiga varian penyakit infeksi baru pada manusia atau penyakit lama yang muncul kembali. Ada kecenderungan bahwa penyakit infeksi pernapasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus baru pada populasi yang terindikasi di kawasan tertentu.

WHO telah mengumumkan sejumlah penyakit yang masih mengancam umat manusia, yaitu demam berdarah (*Dengue Fever*), *Tuberculosis* (TBC), *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS), penyakit sapi gila (Mad Cow) atau *Variant Creutzfeldt-Jakob Disease* (VCJD), *Avian Influenza* (H5N1) atau flu burung (Bird Flu), *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), flu babi (Swine Flu/H1N1 flu virus), *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), *Ebola*, dan *Avian Influenza* (H7N9) atau flu burung varian baru, serta virus Zika. Secara geografis, kawasan Asia, Afrika Sub-Sahara, Amerika Latin, dan Karibia diidentifikasi oleh WHO sebagai wilayah yang rawan terhadap munculnya berbagai penyakit yang berbahaya (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Ancaman nyata tersebut terjawab dengan virus corona jenis baru yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pernafasan, seperti SARS dan MERS. Virus corona biasa dijumpai pada hewan, seperti musang, unta, dan kelelawar. Tidak hanya menginfeksi hewan, tetapi virus ini bisa menular dari hewan ke manusia serta dapat menular antar manusia. Virus corona ini baru muncul pada 2002 pada kasus SARS dan MERS pada 2012. Saat ini yang muncul bukan virus baru, tapi virus corona yang telah bermutasi dan karena mutasi jadi lebih berbahaya (Universitas Gajah Mada, 24 Januari 2020). Hingga saat ini, Covid-19

setidaknya telah dideteksi di 180 negara. Jumlah kasus positive virus corona di dunia melampaui 862.000. Dari jumlah tersebut, 42.000 diantaranya meninggal dunia dan 178.800 telah sembuh. Namun, ada sekitar 40 wilayah di seluruh dunia belum melaporkan satu pun kasus positif corona (BBC News, 2 April 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak covid-19 bahkan menyumbang 7,8 persen angka kematian dan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, pemerintah Indonesia justru enggan membuka informasi secara jelas ke publik dengan dalih menangkalkan kepanikan. Di tengah angka kasus yang terus meningkat, Indonesia juga menerima 49 tenaga kerja asing dari China pada pertengahan Maret lalu (Kompas.com, 22 Maret 2020). Sejumlah kalangan khawatir bahwa Presiden Joko Widodo tampaknya lebih memperhatikan dampak Covid-19 terhadap ekonomi dibandingkan meningkatkan sistem kesehatan negara.

Kekhawatiran itu terlihat ketika presiden menolak pemberlakuan *lockdown* atau penguncian sebagian Jakarta dan Jawa Barat, meski ada desakan dari Gubernur Anies Baswedan. "Kami percaya Jakarta seharusnya menghentikan kegiatan di ibu kota dan mencegah orang datang atau meninggalkan kota. Kita tidak bisa memutuskan ini sendiri, tetapi ada kebutuhan untuk bertindak cepat," kata Anies. Kendati ada penurunan aktivitas bisnis dengan banyaknya orang bekerja dari rumah, presiden lagi-lagi mengingatkan para pemimpin daerah bahwa kebijakan penguncian di tingkat regional atau nasional berada dalam wewenang pemerintah pusat.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis merumuskan pertanyaan masalah "Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah Covid-19 dari perspektif ekonomi"?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan memahami dan menyelidiki individu atau kelompok tertentu yang mengalami persoalan sosial ataupun kemanusiaan, dalam proses penelitian ini peneliti diharuskan memunculkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada partisipan atau

narasumber. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif yaitu dari umum ke khusus, dan kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun pendekatan studi kasus dilakukan untuk menyelidiki persoalan khususnya dalam rangka evaluasi. Peneliti akan menganalisa kasus secara mendalam. Kasus yang diteliti dibatasi oleh waktu dan aktifitas tertentu. Peneliti mengumpulkan informasi terperinci menggunakan prosedur pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. (Cresswell, 2014, h.14). Data penelitian diperoleh dari studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Miles Hubermann, yaitu koleksi data, kondensasi, penyajian data, dan kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1994, h.10-12).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian strategi menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster adalah “*Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should do it with (means)*”. (Nelson, 2016, h.243-244). Dari teori tersebut esensi strategi merupakan proses pengambilan keputusan terhadap elemen-elemen utama dari suatu strategi, meliputi *Ends* (sasaran, tujuan, objek, target), *Ways* (cara bertindak, konsep, metode) dan *Means* (sarana, kekuatan, sumber daya, potensi). Dengan demikian perumusan strategi harus mengandung tiga elemen tersebut dan harus seimbang.

1. Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

Mengacu data Passport Index yang diperbarui per 8 Januari 2020, ada 85 negara di dunia yang membebaskan visa kunjungan bagi wisatawan Indonesia. Sekarang, jangankan berpikir soal visa, banyak rute penerbangan internasional hilang akibat virus yang menjalar cepat ke seantero negara tersebut. Di Tanah Air, AirAsia Indonesia telah menutup semua rute domestik hingga Juni 2020. Di luar itu, maskapai lain pun harus terbang dengan penumpang yang terbatas. Di Indonesia saja, sebanyak 1.174 hotel dan 286 restoran tutup per 1 April 2020. Akibatnya, ribuan karyawan mereka terpaksa dirumahkan. “Sektor-sektor bisnis yang membutuhkan kehadiran menjadi korban Covid-19,” kata Ketua Perhimpunan

Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani.

Dalam Kajian Perdagangan dan Industri, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) edisi Maret 2020 disebutkan, dampak terbesar wabah Covid-19 yang langsung terlihat adalah terhambatnya rantai pasokan. Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani, 30-50% bahan baku industri plastik, tekstil, alas kaki, baja dan kimia bergantung pada Tiongkok. Hal itu diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa selama Februari 2020, nilai impor bahan baku/penolong turun 15,89% menjadi US\$ 8,89 miliar, dan barang modal turun 18,03% menjadi US\$ 1,83 miliar. Penurunan impor pada Kuartal I 2020 diprediksi dapat mencapai 10%.

Di sisi lain, terhambatnya kegiatan industri domestik karena kekurangan bahan baku dapat berakibat berhentinya kegiatan produksi domestik. Ujungnya, kondisi tersebut akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang konsumsi dan pengurangan pekerja. Dari sisi ekonomi, terdapat beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak Covid-19. Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi menyatakan, dalam jangka pendek, pemerintah harus memastikan ketersediaan barang dan stabilitas harga bahan pokok. Beberapa bahan pokok yang perlu menjadi perhatian misalnya beras, daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah, bawang putih, cabe merah/cabe rawit, minyak goreng dan gula pasir (katadata.co.id, 2020).

Seorang Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira memproyeksikan Indonesia berpotensi kehilangan Rp 127 triliun seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang semakin tertekan. Perhitungan itu didasarkan pada pernyataan pemerintah bahwa setiap penurunan ekonomi China sebesar 1% akan berimbas pada penurunan ekonomi Indonesia sebesar 0,3%. Ekonomi Indonesia bisa terpengaruh sebesar 0,3% karena korelasi perdagangan dan investasi Indonesia-China yang cukup besar. Adapun sebelum merebaknya virus Corona, Indef telah memasang target pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu optimistis terhadap Indonesia yaitu 4,8%.

Target tersebut jauh di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah pada level 5,3%. Dengan PDB pada

tahun 2019 menurut harga berlaku mencapai Rp 15.833,9 triliun, maka pertumbuhan ekonomi dengan angka dalam asumsi APBN 2020 sebesar 5.3%, menjadi sebesar Rp 16.673 triliun. Namun, Indef memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi makin tertekan hingga level 4,5% sepanjang tahun 2020 ini sebagai imbas dari wabah Corona. Bhima mengatakan bahwa jika pertumbuhan hanya 4.5% maka PDB nilainya Rp 16.546 triliun. Ini berarti kita kehilangan Rp 127 triliun,” tandas Bhima.

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Wabah Covid-19

Salah satu karakteristik penyakit Covid-19 ini adalah mudah menular, sehingga dengan cepat bisa menjangkiti banyak orang. Penyebaran yang cepat ini bisa digambarkan dengan kurva warna merah pada grafik dibawah ini. Kurva akan mencapai puncak dengan melampaui kapasitas sistem kesehatan untuk menanganinya. Para ahli mengatakan melandaikan kurvai atau memperlambat penyebaran virus corona (COVID-19) adalah jalan keluar mengakhiri pandemic (Kemendagri, Maret 2020).

Menurut mereka intinya adalah melandaikan kurva, mencegah kurva membentuk puncak yang tajam. Melandaikan kurva bisa dicapai dengan memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus infeksi di satu waktu masih bisa ditangani sarana kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, orang-orang berisiko yang menjadi prioritas dapat memperoleh layanan yang memadai.



Gambar 1. Kurva Penyebaran Covid-19

Cara untuk melandaikan kurva tersebut ialah Ketahui cara mengurangi risiko, Ketahui informasi yang benar, Ketahui apa yang perlu dilakukan bila sakit. Pemerintah di berbagai negara telah mengambil tindakan-tindakan yang

diperlukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tindakan-tindakan itu disesuaikan pada jumlah kasus di wilayahnya. Ada yang memberlakukan libur kerja, pembatalan pertemuan besar pembatasan perjalanan dan lainnya (Kemendagri, 2020).

Indonesia pun telah melakukan sejumlah tindakan mengurangi penyebaran. Upaya melandaikan kurva ini bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan non-medis, yang bisa dilakukan oleh semua pihak dibawah koordinasi pemerintah daerah. Sebagai upaya yang lebih komprehensif pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah yang peningkatan pasien positive corona meningkat cepat.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan *statement* bahwa, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan.

Kebijakan ini berlandaskan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Seiring dipilihnya kebijakan PSBB, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayahnya, yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Hal tersebut mengingatkan kita, bahwa sempat terjadi kebijakan “*local lockdown*” yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia.

Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyampaikan bahwa kurva kasus Covid-19 masih terus meningkat, berdasarkan data pasien positif yang terkonfirmasi (Kompas.com, 10 April 2020). Tentu hal tersebut meresahkan masyarakat, sebab hal ini menandakan pemerintah belum tangkas dalam menyelesaikan permasalahan.

3. Dampak Ekonomi dari Kebijakan PSBB

Penerapan PSBB belum terlaksana secara merata disemua daerah, hal ini menjadi sesuatu yang wajar karena adanya syarat yang ruwet yang perlu dipenuhi oleh masing-masing daerah dalam penerapan PSBB. Realisasi kebijakan

selanjutnya yakni terkait dengan bantuan sosial yang diberikan kepada lapisan masyarakat bawah. Pada konferensi pers, Presiden Jokowi mengumumkan akan dilakukannya bantuan sosial ini dalam berbagai bentuk, diantaranya seperti sembako, bantuan langsung tunai, penggratisan dan diskon biaya listrik oleh golongan tertentu, pelatihan kepada para sopir bus, taksi, dan truk, serta keringanan pembayaran kredit yang ditujukan kepada pelaku UMKM dan ojek online (CNBC, 9 April 2020)

Namun, pada konferensi pers selanjutnya masih terdapat beberapa pertanyaan yang diwakili oleh masyarakat bahwa masih terdapat ojek *online* yang mengaku masih dikejar-kejar oleh rentenir. Tetapi pihak OJK mengaku telah menyikapi hal ini dengan mengadakan kerja sama dengan perusahaan ojek online yang mempekerjakan pengemudi ojek yang bersangkutan, agar pihak perusahaan dapat ikut andil dalam penyelenggaraan bantuan ini (Kompas.com, 6 April 2020).

Bantuan yang tak kalah penting yakni bantuan langsung tunai, yang menjadi salah satu harapan masyarakat bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena semenjak kasus Covid-19 banyak masyarakat kecil yang mengalami penurunan penghasilan yang begitu signifikan. Apalagi terkait dengan kebijakan PSBB di DKI Jakarta, yang dengan tegas melarang ojek online untuk mengangkut penumpang. Pengurangan pendapatan harian selain dirasakan oleh pengemudi ojek, juga dirasakan oleh mereka yang bekerja didalam UMKM, supir taksi, supir angkot, dan mereka yang penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Oleh karena itu bantuan langsung tunai perlu direalisasikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun, lagi-lagi masih terdapat kejadian pilu sebagai dampak dari kasus Covid-19, yakni adanya pengemudi ojek online dan keluarga yang diusir dari kontraknya dikarenakan belum membayar uang kontrakan. Pengemudi ojek *Online* tersebut mengaku bahwa semenjak adanya kasus Covid-19 dirinya sangat susah untuk memperoleh pendapatan (Kompas.com, 8 April 2020). Kemudian, hal ini menyebabkan dirinya tidak bisa membayar kontrakan. Ketika diwawancara oleh wartawan disalah satu stasiun televisi, pengemudi tersebut mengaku belum mendapatkan bantuan apa-apa dari pemerintah.

Maka, hal ini menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai belum berjalan, atau bisa saja sudah berjalan tetapi masih belum merata dan tepat sasaran.

Dengan melihat pernyataan diatas, maka kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah guna menyikapi adanya pandemi Covid-19, masih dalam proses menuju pelaksanaan. Meskipun belum dilakukan secara menyeluruh, tetapi setidaknya sudah terdapat perkembangan yang dilakukan oleh beberapa daerah. Namun, masih terdapat juga daerah yang masih mengkaji kebijakan tersebut. Begitu juga dengan kebijakan bantuan sosial yang dicetuskan Presiden Jokowi, masih dalam proses pemaksimalan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

4. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Wabah Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun membawa dampak ekonomi yang luas. Untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi ini, Presiden Jokowi mengumumkan sejumlah kebijakan berikut ini (Kompas.com, 10 April 2020):

a.) Dukungan Terhadap Bidang Kesehatan

Terkait dukungan terhadap bidang kesehatan, anggaran Rp75 triliun itu akan digunakan untuk perlindungan kepada tenaga kesehatan, seperti pengadaan alat pelindung diri (APD). Anggaran juga akan digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti alat uji coba, *reagen*, *ventilator*, *hand sanitizer*, dan lainnya.

Selain itu anggaran bidang kesehatan juga akan dialokasikan untuk memperbaiki rumah sakit rujukan Covid-19, termasuk Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan santunan kematian tenaga medis sebesar Rp 300 juta.

b.) Insentif Bulanan Tenaga Medis

Selain memberikan santunan kematian kepada perangkat medis, pemerintah juga akan memberikan insentif lainnya yaitu insentif dokter spesialis Rp15 juta/bulan, dokter umum Rp10 juta/bulan, perawat Rp7,5 juta/bulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta/bulan.

c.) Perlindungan Sosial

Prioritas kedua, adalah anggaran untuk perlindungan sosial. Dalam video conference dari Istana Bogor pada 31 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH [Program Keluarga Harapan] yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu negara juga akan menaikkan penerima kartu sembako dari sebelumnya 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Bantuan kepada penerima kartu pun naik sekitar 33 persen, dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.

d.) Tarif Listrik

Pemerintah juga akan membebaskan biaya untuk pelanggan listrik 400 VA selama 3 bulan ke depan. "Perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020," katanya. Jokowi menambahkan, bagi pelanggan listrik 900 VA akan mendapatkan keringanan berupa potongan harga sebesar 50 persen selama periode yang sama. Saat ini jumlah pelanggan memakai listrik 900 VA sekitar 7 juta pelanggan.

Selain itu pemerintah menambah insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175.000. Pemerintah juga memberikan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok dengan alokasi anggaran Rp25 triliun.

e.) Naikkan Anggaran Kartu Prakerja

Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menaikkan anggaran Kartu Prakerja dari semula Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Sementara itu, jumlah penerima manfaat ditetapkan sebesar 5,6 juta orang dan diutamakan pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil. Tiap-tiap Kartu Prakerja memiliki nilai manfaat sebesar Rp650.000 sampai Rp 1 juta per bulan dan akan diberikan selama 4 bulan ke depan. Insentif ini berupa biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000.

f.) Pemulihan Ekonomi

Prioritas ketiga Presiden adalah untuk

memulihkan ekonomi usai pandemi Covid-19 di Indonesia mereda. Pemerintah akan menanggung PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta dalam satu tahun. Pemerintah juga membebaskan PPh impor untuk 19 sektor tertentu. Hal ini menysasar Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah. Pemerintah juga mengurangi PPH 25 sebesar 30 persen untuk sektor tertentu KITE dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah. Tarif PPh badan juga diturunkan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.

g.) Antisipasi Defisit APBN

Presiden Jokowi menyatakan bahwa PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini diterbitkan untuk antisipasi defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07 persen. Oleh karena itu pemerintah membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3 persen. Namun relaksasi defisit hanya untuk 3 tahun, yakni 2020 hingga 2022. Setelahnya atau pada 2023 kembali disiplin fiskal maksimal 3 persen.

h.) Nasabah KUR dapat Keringanan Angsuran

Salah satu prioritas penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi, selain pengurangan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor tertentu. Pemerintah juga berupaya melindungi para pengusaha kecil dengan memberikan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema [kredit usaha rakyat] KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.

i.) Prioritas di Bidang non-Fiskal

Presiden Jokowi juga menyampaikan stimulus dalam bentuk non-fiskal. Hal ini guna menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan, termasuk bahan baku industri.

"kebijakan non fiskal seperti penyederhanaan Lartas ekspor, Penyederhanaan Lartas Impor, percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem," ucap Jokowi.

j.) Refokusing dan Relokasi Belanja

Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refokusing dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19, melakukan penghematan belanja (belanja K/L maupun TKDD) yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020 - sehingga dilakukan penghematan Rp190 triliun dan termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun.

k.) Menyiapkan Perpu

Menurut Jokowi, setelah berbicara dengan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Komisioner OJK, dan Kepala LPS, PERPPU yang akan dikeluarkan Pemerintah berisikan tiga hal penting. Pertama, kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra ordinary*) dalam menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Kedua, melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020, dan terakhir memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

5. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi

Berkaitan dengan penanganan wabah dan keputusan rantai penyebaran Covid 19, pemerintah belum memberikan rapid test kepada seluruh masyarakat. Dalam upaya untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan *at all cost* seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan Alat Pelindung Diri (APD); menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, ataupun hal-hal yang bersifat pencegahan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Konsekuensi pembengkakan defisit anggaran, sejalan dengan pendapatan APBN yang juga turun tajam, memang akan membebani pemerintah. Namun, perhitungan kemanusiaan semestinya harus lebih dikedepankan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat

Untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat

mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah, di antaranya tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran \$20 per barrel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Strategi ini dapat menyelamatkan kehidupan masyarakat kelas menengah kebawah yang penghasilannya saat ini hanya bisa dimanfaatkan untuk makan.

Dalam keadaan melemahnya daya beli masyarakat serta perlambatan aktivitas ekonomi lainnya, sektor industri juga harus menjadi perhatian pemerintah agar tetap bisa bertahan di tengah krisis karena wabah Covid-19 ini atau dapat segera pulih saat wabah telah selesai. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan relaksasi Pajak Penghasilan baik pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30%) semestinya diperluas. Pasalnya, perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penundaan pembayaran cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah, seperti sektor transportasi dan pariwisata.

Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat bawah agar aktivitas ekonomi terus berjalan yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perlu didukung oleh kebijakan untuk menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang khususnya pangan. Di saat seperti ini, potensi *panic buying* dan penimbunan sangat besar, sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Dalam situasi seperti ini, sebagaimana di Tiongkok, aparat militer dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasannya, termasuk membantu proses pengamanan *supply* dan distribusi barang.

Selain itu, penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan

dalam penyalurannya sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini belajar dari pengalaman penyaluran bantuan sosial selama ini yang belum terdistribusi secara merata khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan. Oleh karena koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tujuan BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan *rescheduling* dan *refinancing* utang-utang sektor swasta, selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi risiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Selain itu, Bank Indonesia (BI) dan OJK perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi, khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti saat ini.

Pemerintah perlu membuka peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru. Untuk kebijakan fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara diperlukan di tengah semakin banyaknya kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian. Untuk kebijakan moneter, perlu mencontoh otoritas moneter beberapa negara yang aktif terjun memberikan insentif, khususnya ketika kebijakan suku bunga acuan dan beragam kebijakan konvensional tidak bekerja secara optimal seperti saat ini. The Fed sendiri misalnya mempunyai kebijakan Quantitative Easing untuk menginjeksi likuiditas ke masyarakat.

Terobosan yang bisa dilakukan BI dan pemerintah yaitu merevisi Peraturan Bank Indonesia no/10/13/PBI/2008 ataupun Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dengan memberikan keleluasaan BI untuk membeli SUN di pasar keuangan primer untuk mengakomodasi kepentingan pembiayaan negara. (hukum online.com, 2020).

KESIMPULAN

Untuk mempercepat penanganan wabah Covid-19, pemerintah selangkahnya lebih banyak mengucurkan dana untuk pemenuhan kebutuhan APD, menggratiskan *rapid test* atau *swab test*

untuk seluruh masyarakat, serta memberikan masker secara gratis sebagai upaya pencegahan. Kebijakan tersebut memang akan menghasilkan pembengkakan defisit anggaran, namun mana yang lebih penting dari nyawa masyarakat.

Dampak dari PSBB yang menyebabkan hilangnya sejumlah penghasilan masyarakat, khususnya mereka yang mendapatkan penghasilan harian mengharuskan pemerintah memberikan BLT sehingga seluruh masyarakat dapat tetap bertahan hidup dan roda perekonomian tetap berjalan. Namun pemberian BLT ini harus tepat sasaran dan menyeluruh sehingga tidak ada masyarakat bawah yang terlewat.

Kebijakan pemerintah mengurangi biaya listrik dan BBM akan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kedua hal tersebut merupakan belanja rumah tangga yang primer. Pada saat pelemahan ekonomi seperti ini, kebijakan tersebut akan sangat membantu masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi yang tidak diketahui kapan berakhir.

Jadi, pemerintah harus mengeluarkan paket ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti BLT, penurunan biaya listrik dan BBM, pemberian pemeriksaan gratis, ketimbang membesarkan nilai manfaat kartu prakerja dan kartu penerima sembako bagi program keluarga harapan, serta pemberian insentif bagi tenaga medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aria, Pingit. (7 April 2020). *Globalisasi dan Rantai Pasok Dunia yang Terkunci Pandemi Covid-19*. Diakses pada 23 Mei 2020 dari Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/telaah/2020/04/07/globalisasi-dan-rantai-pasok-dunia-yang-terkunci-pandemi-covid-19/1>
- Asmara, Chandra Gian. (9 April 2020). *Catat! Ini BLT dan Sembako yang Mau Disebar Jokowi*. Diakses pada 21 Mei 2020 dari CNBC: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409162618-4-150957/catat-ini-blt-dan-sembako-yang-mau-disebar-jokowi>
- BBC News Indonesia. (2 April 2020) *Virus corona: Negara-negara dan teritori ini belum melaporkan kasus Covid-19*. Diakses pada 20 Mei 2020, dari BBC.com:

- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52132019>
- C. Richard Nelson. (2016). *The Life and Work of General Andrew J. Goodpaster*. New York: Rowman & Littlefield.
- Cresswell, John W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed method approach 4th ed.* California: SAGE Publications.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. (22 Maret 2020). *Potret Penanganan Virus Corona di Indonesia...* Diakses pada 20 Mei 2020, dari [Kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/173100365/potret-penanganan-virus-corona-di-indonesia-?page=2](https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/173100365/potret-penanganan-virus-corona-di-indonesia-?page=2)
- Heriani, Fitria Novia. (31 Maret 2020). *Kebijakan dan Kesigapan Pemerintah Kunci Tangani Dampak Covid-19*. Diakses pada 22 Mei 2020 dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e82bdc2d2dd6/kebijakan-dan-kesigapan-pemerintah-kunci-tangani-dampak-covid-19/>
- Ika. (24 Januari 2020). *Masyarakat Diminta Tidak Panik Hadapi Virus Corona*. Diakses pada 23 Mei 2020 dari website Universitas Gajah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/18955-masyarakat-diminta-tidak-panik-hadapi-virus-corona>
- Kementerian Dalam Negeri. (Maret 2020) *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah*. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. Diunduh pada 23 Mei 2020 dari https://www.kemendagri.go.id/documents/covid-19/BUKU_PEDOMAN_COVID-19_KEMENDAGRI.pdf
- Kementerian Pertahanan RI. *Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015*.
- Ladjar, Bonfillio Mahendra Wahanputra dan Sabrina Asil, (8 April 2020) *Kisah Dodo, Pengemudi Ojek Online Diusir dari Kontrakan dan Tidur di Pinggir Ruko*. Diakses pada 22 Mei 2020 dari Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/08/18100551/kisah-dodo-pengemudi-ojek-online-diusir-dari-kontrakan-dan-tidur-di-pinggir-ruko>
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis, 2nd Ed.* Newbury Park, CA: Sage.
- Pranita, Ellyvon dan Sri Anindiati Nursastri *Kasus Corona di Indonesia Bertambah, Sudah Mencapai Puncak Pandemi?* Diakses pada 22 Mei 2020 dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/10/120400423/kasus-corona-di-indonesia-bertambah-sudah-mencapai-puncak-pandemi->
- Ronal. (9 Maret 2020). *Dampak Virus Corona, Kerugian Ekonomi Indonesia Bisa Mencapai 127 Triliun*. Diakses pada 24 Mei 2020 dari PasarDana: <https://pasardana.id/news/2020/3/9/dampak-virus-corona-kerugian-ekonomi-indonesia-bisa-mencapai-127-triliun/>
- Ulya, Fika Nurul dan Yoga Sukmana, (6 April 2020). *Viral Pengemudi Ojol Masih Dikejar Debt Collector, Ini Kata OJK*. Diakses pada 22 Mei 2020 dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2020/04/06/134825526/viral-pengemudi-ojol-masih-dikejar-debt-collector-ini-kata-ojk?page=all>